

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK SEWA-
MENYEWAWA *PIRIK'AN* DI DESA TAJUNG WIDORO
KECAMATAN BUNGAH KABUPATEN GRESIK**

skripsi

Oleh

**Muhammad Hiizbu Nashruddin
C02214018**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM PERDATA ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SURABAYA
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda dibawah ini saya:

Nama : Muhammad Hizbu Nashruddin

Nim : C02214018

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah/ Hukum Perdata/ Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa-Menyewa *Pirik'an* di desa
Tajung Widoro Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya saya sendiri kecuali pada bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 20 Desember, 2018

Saya yang menyatakan,



Muhammad Hizbu Nahrudin

NIM: C02214002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh M. Hizbu Nashruddin NIM. C02214018 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 20 Desember 2018

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'S' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.


Dr. Sanuri, M.fil.,I.
197601212007101001

PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Hizbu Nashruddin, NIM. C02214018 ini telah di pertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 06 Februari 2019, dandapatditerima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Ekonomi Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:


Penguji I


Dr. Sanuri, S.Ag., M.Fil.I
NIP.197110102007011052

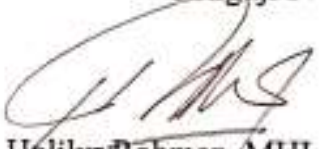
Penguji II


Dr. H. Imam Amrusi Jaclani, M.Ag
NIP.197001031997031001

Penguji III


H.M. Ghufro, L.C, MHI.
NIP.197602242001121003

Penguji IV


Holilur Rohman, MHI
NIP. 198710022015031005

Surabaya, 06 Februari 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,


Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP.195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Hizbu Nashruddin
NIM : C02214018
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : Khizbu99@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
 Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK SEWA – MENYEWAKAN 'PIRIK'AN
DI DESA TAJUNG WIDORO KECAMATAN BUNGAH KABUPATEN GRESIK**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 Februari 2019

Penulis

(Muhammad Hizbu Nashruddin)

Bab pertama adalah pendahuluan, yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat tentang landasan teori *ijārah* yang meliputi definisi *ijārah*, dasar hukum *ijārah*, syarat dan rukun *ijārah*, dan mekanisme *ijārah*.

Bab ketiga memuat tentang sejarah desa Tajung Widoro kecamatan bungah kabupaten Gresik, praktek sewa-menyewa *pirik'an* di desa Tajung widoro kecamatan bungah kabupaten Gresik.

Bab keempat memuat tentang Tinjauan hukum Islam terhadap sewa-menyewa *pirik'an* di desa Tajung widoro kecamatan bungah kabupaten Gresik.

Bab kelima ini merupakan bagian akhir dari uraian yang terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian yang didasarkan menurut rumusan masalah dan berisi tentang saran penulis.

BAB II KONSEP DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian *Ijārah*

Ijārah secara bahasa berasal dari kata al-ajru yang berarti *al-‘iwadhu* (ganti). *al-Ajru* berarti upah atau imbalan untuk sebuah pekerjaan. *al-Ajru* makna dasarnya adalah pengganti, baik yang bersifat materi maupun immateri.¹ *ijārah* adalah suatu transaksi sewa menyewa antara pihak penyewa dengan yang mempersewakan sesuatu harta atau barang untuk mengambil manfaatnya dengan harga tertentu dan dalam waktu tertentu.²

Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda beda pendapat mendefinisikan tentang *ijārah* antara lain sebagai berikut:

1. Menurut Ulama’ Syafi’iyah *ijārah* adalah *ijārah* adalah akad atas penggunaan suatu manfaat yang disengaja, diketahui, dan diperbolehkan menurut syara’ dan menggantinya dengan imbalan yang diketahui.
2. Menurut Ulama’ Hanafiyah bahwa *ijārah* ialah:

عُقْدٌ يُفِيدُ تَمْلِيكَ مَنَفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ مِنَ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ بِعَوَظٍ

Artinya:“Akad untuk membolehkan kan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan”.³

3. Menurut Ulama’ malikiyah dan hanabilah bahwa *ijārah* adalah

¹ Imam, Mustofa, *Fiqh Muammalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 101.

² Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), 15.

³ Suhendi Hendi,, *Fiqh Muammalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 114.

Menggunakan manfaat dari sesuatu yang diperbolehkan menurut syara' dengan jangka waktu tertentu dengan memberikan imbalan.

4. Menurut Syaikh Syihab al-Din dan Syaikh Umairah bahwa yang dimaksud dengan *ijārah* adalah.

عَقْدٌ عَلَىٰ مَنَفَعَةٍ مَّعْلُومَةٍ مَّقْصُودَةٍ قَابِلَةٍ بِذَلِّ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ وَضَعًا

Artinya: “Akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu”.⁴

5. Menurut Mukhammad al-Syaribni al-Khatib bahwa yang dimaksud dengan *ijārah* adalah:

تَمْلِيكَ مَنَفَعَةٍ مَّعْلُومَةٍ بِعَوَضٍ بِشُرُوطٍ

Artinya: “Pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat”

6. Menurut sayyid sabiq bahwa *ijārah* ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat jalan penggantian.⁵

7. menurut hasbi Ash-Shiddiqie bahwa *ijārah* adalah:

عَقْدٌ مَوْضُوعَةٌ الْمِبَادَلَةَ عَلَىٰ مَنَفَعَةِ الشَّيْءِ مِدَّةً مَّحْدُودَةً أَيْ تَمْلِيكُهَا بِعَوَضٍ فَهِيَ بَيْنَا فِع

Artinya: “akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat”.⁶

⁴ Suhendi Hendi,, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 114.

⁵ Suhendi Hendi,, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 114.

8. Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.

Berdasarkan dari beberapa pengertian *ijārah* di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *ijārah* adalah suatu jenis perikatan atau perjanjian yang bertujuan mengambil manfaat suatu benda yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar upah sesuai dengan perjanjian dan kerelaan kedua belah pihak dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan.

B. Dasar Hukum *ijārah*

Ijārah dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut Jumhur Ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh *syara'* berdasarkan ayat al-Qur'an, hadits-hadits Nabi dan ketetapan ijma Ulama. Ulama bersepakat bahwa *ijārah* diperbolehkan. Ulama memperbolehkan *ijārah* berdasarkan legitimasi dari al-Qur'an, al-Sunnah dan ijma'.

a) Dasar Hukum al-Qur'an

1. Firman Allah dalam surat *al-Baqarah* ayat 233:

⁶ Suhendi Hendi,, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 115.

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا

اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”(Q.S. *al-Baqarah* ayat 233)⁷

Jadi maksud dari ayat diatas adalah bahwasanya ketika ada seseorang menyusukan anaknya kepada orang lain. Sudah seharusnya orang yang menyusukan anaknya kepada orang lain tadi memberikan upah atau imbalan yang sepatutnya kepada orang yang telah menyusuinya dengan kerelaan hati. Jadi, seperti halnya dengan akad *ijarah* di atas yang artinya *ijarah* adalah sewa menewa yang dilakukan *mu'jir* dan *musta'jir*. *Mu'jir* sebagai orang yang menyewakan barang sedangkan *musta'jir* sebagai orang yang menyewa barang. Dan sudah seharusnya *mus'tajir* memberikan imbalan yang sesuai kepada *mu'jir* sesuai dengan kesepakatan.

2. Firman Allah dalam surat *al-Thalaq*, ayat 6 yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلٍ
فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ

وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمَّ فَسْتَرْضِعُوا لَهُنَّ أُخْرَى ﴿٦﴾

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Tangerang: PT Panca Cemerlang, 2010), 156.

Artinya : tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.⁸

Jadi yang dimaksud dari ayat di atas adalah jika menyusukan anak-anak kalian hasil hubungan dengan mereka (maka berikanlah kepada mereka upahnya) sebagai upah menyusukan. Dan bermusyawarahlah di antara kalian antara kalian dan mereka (dengan baik) dengan cara yang baik menyangkut hak anak-anak kalian, yaitu melalui permusyawaratan sehingga tercapailah kesepakatan mengenai upah menyusukan. Seperti halnya yang sudah dijelaskan di akad *ijārah* bahwasanya upah atau sewa dalam transaksi *ijārah* harus jelas, memiliki sifat tertentu dan mempunyai nilai yang bersifat manfaat. Dan atas kerelaan kedua pihak pelaku akad.

3. Dalam QS *aL-Qashas*, 26:27 Allah juga berfirman:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ , قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَبْجٍ^ط فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمَنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَسُقَّ عَلَيْكَ^ع سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

Artinya :“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Tangerang: PT Panca Cemerlang, 2010), 542.

orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".berkatalah Dia (Syuaib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik."(Q.S. *al-Qashas*, ayat 26-27)⁹

Berdasarkan ayat diatas bahwasanya orang yang baik dan dapat dipercaya itulah orang yang layak dijadikan pekerja untuk orang yang memperkerjakannya. Jadi, dapat disimpulkan dari masing-masing ayat yang menjelaskan tentang dasar hukum *ijārah* bahwasanya *ijārah* yang dijelaskan dalam ayat al-Quran adalah *ijārah* atau upah yang seharusnya dibayarkan secara patut kepada orang yang bekerja dan atas dasar kesepakatan bersama dengan kerelaan hati antara kedua belah pihak.

b) Dasar Hukum As-Sunnah

Para ulama fiqih juga mengemukakan alasan dari beberapa sebuah sabda Rasulullah:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ السَّلْمِيِّ حَدَّثَنَا
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Al Abbas ibn Al Walid Ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb ibn Sa'id

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Tangerang: PT Panca Cemerlang, 2010), .280.

ibn Athiah As Salami berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam dari Bapaknya dari Abdullah ibn Umar ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya". (HR Abu Ya'La, Ibnu Majah ath-Thabrani dan at- Tirmizi).¹⁰

Maka berilah upah atau imbalan sepentasnya atas jasa yang telah mereka kerjakan dengan kerelaan hati. Dan (sebelum kering keringat mereka) dengan secara tepat waktu seperti mereka mengerjakan perintahmu. Dalam riwayat Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri Rasul SAW, bersabda:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ أَنَّهُ سَأَلَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ فَقُلْتُ: أَبِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ؟ فَقَالَ أَمَّا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَلَا بَأْسَ بِهِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Qutaibah ibn Sa'id dari Malik dari Rabi'ah ibn Abu Abd ar-Rahman dari Hanzhalah ibn Qais bahwa ia bertanya kepada Rafi' ibn Khadij mengenai penyewaan tanah. Kemudian ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah melarang dari penyewaan tanah. Kemudian Hanzhalah berkata; apakah (boleh) jika dilakukan dengan upah emas dan perak? Rafi' berkata; adapun dengan upah emas dan perak, maka tidak mengapa. (HR Abu Dawud).¹¹

¹⁰Abu abd allah Muhammad ibn majah, al-sunan, Vol 3 (Bairut: al risalah al ulumiyah,2009), 510-511.

¹¹ Abu Dāwūd al-sijistaini, *Sunan Abū Dāwūd* Vol. 2 (Bairut: Dar al-kitub al ulama', 1996) 465.

Jadi sebelum melakukan akad *ijārah* sudah seharusnya memenuhi syarat dan rukun *ijārah* dan keterbukaan antara kedua belah pihak untuk kesepakatan mengenai upah nya tanpa ada yang ditutup tutupin. Sehingga jelas manfaatnya dan diperbolehkan upah nya tidak harus menggunakan mata uang.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا الْمَخْزُومِيُّ كِلَاهُمَا عَنْ وَهَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ وَاسْتَعَطَ (رواه البخارى ومسلم واحمد بن حنبل)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar ibn Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Affan ibn Muslim. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Ishaq ibn Ibrahim telah mengabarkan kepada kami Al Mahzumi keduanya dari Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thawus dari Ayahnya dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam meminta untuk dibekam, lalu beliau memberi upah kepada tukang bekam." (HR al-Bukhari, Muslim, Akhmad ibn Hambali).¹²

jadi hadis diatas ialah bahwasanya Rasulullah saw juga tetap membayar upah kepada orang yang telah membekamnya. Upah yang dapat dimanfaatkan oleh pekerja tadi. Dan upah yang jelas manfaatnya.

c) Dasar Hukum landasan *Ijma'*

¹² Abi Husain muslim ibn al- hajjaj ibn muslim, Sahih muslim, Vol 4 (Mesir: Dar al- Tashid, 2014),272.

Mengenai disyari'atkannya *ijārah* semua umat bersepakat tak seorang pun yang membantah kesepakatan (ijma') ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak dianggap.¹³

Umat Islam pada masa sahabat telah ber ijma' bahwa *ijārah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.¹⁴ Perlu diketahui bahwa tujuan disyariatkannya *ijārah* itu adalah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Seseorang mempunyai uang tetapi tidak dapat bekerja dipihak lain ada yang punya tenaga dan membutuhkan uang. Dengan adanya *Ijārah* keduanya saling mendapat keuntungan dan memperoleh manfaat.

C. Rukun *Ijārah*

Sebagai sebuah transaksi umum, *ijārah* baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Menurut ulama Hanafiyah, rukun *ijārah* hanya satu, yaitu *ijāb* (ungkapan menyewakan) dan *kābul* (persetujuan terhadap sewa menyewa). Akan tetapi Menurut jumhur ulama' mengatakan bahwa rukun *ijārah* ada 4 (empat) yaitu:¹⁵

- a. *Aqid* (orang yang akad).

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta : PT Raja Gravindo Persada, 2002), 117.

¹⁴ Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Jakarta : Pustaka Setia, 2012), 124.

¹⁵ Nasrun, Haroen, *Fikih Muammalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 233.

'*Aqid* adalah orang yang melakukan perjanjian/ transaksi, yaitu orang yang menyewakan (*mu'jir*) dan orang yang menyewa (*musta'jir*).

b. *Sihgat* akad.

Sihgat akad adalah pernyataan yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan dua pihak yang melakukan kontrak atau transaksi.¹⁶

c. *Ujrah* (upah)

Ujrah adalah member imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati bersama.

d. Manfaat adalah hasil dari penggunaan objek sewa.¹⁷

D. Syarat *Ijarah*

Menurut jumhur ulama' rukun *ijārah* ada 4 (empat) yaitu : *Sighat al-'aqād* (*ijāb* dan *kābul*), *al-'aqidāyn* (kedua orang yang bertransaksi), *al-ujrah* (*upha*/sewa), *al-manafi'*(manfaat sewa). Sebagai bentuk transaksi, *ijārah* dianggap sah harus memenuhi rukun diatas, disamping rukun juga harus memenuhi syarat-syaratnya. Diantaranya adalah¹⁸:

¹⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 51.

¹⁷ Labib Mz, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Surabaya: Ibntang Usaha Jaya, 2006), 43.

¹⁸ Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 67.

1. Kerelaan kedua pihak pelaku akad. Apabila salah satu pihak dipaksa untuk melakukan akad, maka akadnya dinyatakan tidak sah sebagaimana yang telah disebutkan dalam Q.S. *al-Nisaa'* ayat 29:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(Q.S. *al-Nisa'* ayat 29) ¹⁹

Ayat di atas mengatakan bahwasanya janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang *bāthil*. Jalan yang *bāthil* merupakan jalan yang tidak dibenarkan oleh syariat, jadi sebelum melakukan transaksi seperti jual beli maupun *ijārah* maka lakukan apa yang disyariatkan supaya didalam transaksi tersebut bisa menjadi tansaksi yang baik.

2. Bagi kedua orang yang melakukan transaksi (akad), menurut ulama syafi'iyah dan hanabilah disyaratkan harus baligh dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum baligh atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila, menyewakan harta mereka atau diri mereka (sebagai buruh), menurut ulama syafi'iyah dan hanabilah tidak sah. Akan tetapi ulama' hanafiyah dan malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang bertransaksi (akad) itu tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Tangerang: PT Panca Cemerlang, 2010),

mumayyiz pun boleh melakukan transaksi. Namun ulama hanafiyah dan malikiyah mengatakan, apabila seorang anak yang *mumayyiz* melakukan transaksi *ijārah* terhadap harta atau dirinya, maka akad itu baru dianggap sah apabila disetujui oleh walinya.²⁰

3. Upah atau sewa dalam transaksi *ijārah* harus jelas, memiliki sifat tertentu dan mempunyai nilai yang bersifat manfaat.
4. Manfaat sewa harus diketahui secara sempurna, sehingga dikemudian hari tidak memunculkan perselisihan diantara kedua belah pihak. Apabila manfaat yang menjadi obyek *ijārah* tidak jelas, maka transaksinya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat disampaikan dengan rinci beberapa manfaat yang menjadi obyek *ijārah*

Dengan demikian, jika rukun dan syaratnya terpenuhi, maka perjanjian akad *ijārah* tersebut sah dan mempunyai kekuatan hukum atas perjanjian yang sah, bahwasanya perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan i'tikad baik.

E. *Sighat Akad ijārah*

Akad adalah suatu perikatan antara *ijab* dan *qabul* dengan cara yang dibenarkan *syara'* yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada

²⁰ Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer...*, 232.

objeknya.²¹ Sedangkan yang dimaksud dengan *sighat* akad adalah dengan cara bagaimana *ijab* dan *qabul* yang merupakan rukun-rukun akad itu dinyatakan. *Sighat* akad ijarah itu dapat *dilakukan* dengan beberapa cara, antara lain sebagai berikut:

1) *Sighat* akad secara lisan

Akad dipandang telah terjadi apabila *ijab* dan *qabul* dinyatakan secara lisan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Susunan kata katanya pun tidak terikat dalam bentuk tertentu. Yang terpenting jelas antara pihak-pihak bersangkutan agar tidak mudah menimbulkan persengketaan dikemudian hari.

2) *Sighat* akad dengan tulisan

Tulisan adalah cara alami kedua setelah lisan untuk menyatakan sesuatu keinginan. Maka, jika dua pihak yang akan melakukan akad tidak ada di satu tempat, akad itu dapat dilakukan melalui syarat yang dibawa seseorang utusan atau melalui pos. *Ijab* dipandang terjadi setelah pihak kedua menerima dan membaca surat dimaksud.

Jika dalam *ijab qabul* tersebut tidak disertai dengan pemberian tenggang waktu, harus segera dilakukan dalam bentuk tulisan atau surat yang dikirim dengan perantara utusan atau lewat pos. Bila disertai pemberian

²¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 65.

tenggang waktu, *qabul* supaya dilakukan sesuai dengan lama tenggang waktu tersebut.

3) *Sighat* akad dengan isyarat

Apabila seseorang tidak mungkin menyatakan *ijab* dan *qabul* dengan perkataan karena bisu, akad dapat terjadi dengan isyarat. Namun, dengan syarat ia pun tidak dapat menulis sebab kainginan seseorang yang dinyatakan dengan tulisan lebih dapat meyakinkan dari pada yang dinyatakan dengan isyarat. Maka, apabila seseorang bisu yang dapat menulis mengadakan akad dengan isyarat, akadnya dipandang tidak sah.²²

4) *Sighat* akad dengan perbuatan

Cara lain untuk membentuk akad, selain secara lisan, tulisan atau isyarat, ialah dengan cara perbuatan. Misalnya, seorang pembeli menyerahkan sejumlah uang tertentu, kemudian penjual menyerahkan barang yang dibelinya. Cara ini disebut jual beli saling menyerahkan harga dan barang. Misalnya, dalam akad sewa-menyewa: kita naik bis kota umpamanya. Tanpa kata-kata kita serahkan saja sejumlah uang seharga karcis bis tersebut.²³ Jadi, *sighat* akad dalam *ijārah* syaratnya antara *mu'jir* dan *musta'jir* harus saling rela dan tidak boleh mengandung unsur paksaan.

²² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fikih Muamalat* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), 112.

²³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fikih Muamalah...*, 112.

Karena dengan adanya paksaan menyebabkan perjanjian atau akad menjadi tidak sah.

F. Syarat-syarat *Mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *Musta'jir* (penyewa)

- a. Orang yang menyewakan sesuatu wajib berusaha semaksimal mungkin agar penyewa dapat mengambil manfaat dari apa yang ia sewakan. Misalnya, memperbaiki mobil yang ia sewakan, mempersiapkannya untuk mengangkut dan untuk melakukan perjalanan.
- b. Penyewa, ketika menyewakan wajib menghilangkan semua yang terjadi karena perbuatannya. Kemudian menyerahkan apa yang ia sewa sebagaimana ketika menyewanya.
- c. *Ijārah* adalah akad yang wajib dipatuhi atas dua pihak, *mu'jir* dan *musta'jir*. Karena *ijārah* merupakan salah satu bentuk dari jual beli, maka hukumnya serupa dengan hukum jual beli. Dan masing-masing pihak tidak boleh membatalkan akad kecuali dengan persetujuan pihak lain, kecuali jika ada kerusakan yang ketika akad dilangsungkan penyewa tidak mengetahuinya. Maka hal ini boleh membatalkannya.
- d. Orang yang menyewakan wajib menyerahkan benda yang disewakan kepada penyewa dan memberinya keleluasaan untuk menfaatkannya. Apabila ia menghubungi penyewa untuk memanfaatkan benda yang disewakan selama

masa sewa atau dalam sebagian masa sewa, maka penyewa tidak berhak mendapatkan bayaran secara utuh.²⁴

- e. Jika seorang yang disewa (diupah) jatuh sakit, maka digantikan orang lain, sedangkan bayarannya adalah dari orang yang jatuh sakit tersebut. Kecuali jika telah disepakati bahwa ia harus melakukan sendiri pekerjaan tersebut, maka hal itu tidak bisa digantikan. Karena terkadang tujuan dari akad *ijarāh* tersebut tidak bisa terwujud jika dilakukan oleh orang lain.
- f. Bayaran atau upah wajib diberikan penyewa berdasarkan akad, orang yang disewa tidak berhak untuk meminta upah kecuali setelah menyelesaikan pekerjaannya, karena orang yang diupah (disewa) dipenuhi bayarannya setelah menyelesaikan pekerjaannya. Jika yang disewa adalah benda, maka pemiliknya boleh meminta bayaran setelah penyewa mengambil manfaat yang dibutuhkan atau setelah menyerahkan benda yang disewakan kepada penyewa dan selesai masa sewa dengan tanpa adanya penghalang. Karena bayaran adalah ganti, sehingga ia tidak berhak diterima oleh pemilik kecuali dengan diserahkannya apa yang digantikan dengan bayaran tersebut.
- g. Orang yang disewa wajib bekerja bersungguh-sungguh dan menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Haram baginya menipu dan berkhianat dalam melakukan pekerjaannya. Selama disewa, ia wajib terus bekerja dan tidak

²⁴Shaleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari* terjemah Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 485.

melewatkan sedikitpun waktu dari masa penyewaan tersebut tanpa bekerja. Dan, hendaknya ia bertaqwa kepada Allah dalam melaksanakan kewajibannya tersebut.

G. Sifat *Ijārah*

Ijārah menurut Hanafiyah adalah akad yang *Lazim*, tetapi boleh di *fasakh* apabila terdapat *udzur*, sebagaimana yang telah diuraikan sebelum ini, sedangkan menurut jumhur ulama, *ijārah* adalah akad yang *Lazim* (mengikat), yang tidak bisa di-*fasakh* kecuali dengan sebab-sebab yang jelas, seperti adanya aib (cacat) atau hilangnya objek manfaat. Hal tersebut oleh karena itu *ijārah* adalah akad atas manfaat, mirip dengan akad nikah. Disamping itu, *ijārah* adalah akad *mu'awadhah*, sehingga tidak bisa dibatalkan begitu saja, sama seperti jual beli.

Sebagai kelanjutan dari perbedaan pendapat tersebut, Hanafiyah berpendapat bahwa *ijārah* batal karena meninggalnya seorang pelaku akad, yakni *musata'jir* atau *mu'jir*. Hal itu karena apabila akad *ijārah* masih tetap maka manfaat yang dimiliki oleh *musata'jir* atau uang sewa yang dimiliki oleh *mu'jir* berpindah kepada orang lain (ahli waris) yang tidak melakukan akad, maka *ijārah* tidak sah.²⁵

²⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2013), 326-327.

Misalnya menyewa rumah untuk tempat tinggal yang dibayar dengan tempat tinggal rumah si penyewa, menyewa kendaraan dengan kendaraan, tanah pertanian dengan tanah pertanian, ini pendapat Hanafiyah. Akan tetapi Syafi'iyah tidak memasukkan syarat ini sebagai syarat untuk *Ujrah*.²⁶

H. Pembatalan dan Berakhirnya Perjanjian *Ijārah*

Pada dasarnya perjanjian sewa-menyewa merupakan perjanjian yang lazim, masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian tidak berhak membatalkan perjanjian (tidak mempunyai hak *fasakh*) karena termasuk perjanjian timbale balik. Bahkan, jika salah satu pihak (yang menyewa atau penyewa) meninggal dunia, perjanjian sewa-menyewa masih ada. Sebab dalam hal salah satu pihak meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh ahli waris.

Demikian juga halnya dengan penjualan objek perjanjian sewa-menyewa yang tidak menyebabkan putusannya perjanjian yang diadakan sebelumnya. Namun tidak tertutup kemungkinan pembatalan perjanjian (*fasakh*) oleh salah satu pihak jika ada alasan atau dasar yang kuat.²⁷

Para ulama fiqih menyatakan bahwa akad *ijārah* akan berakhir apabila :

1. Obyek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang dijahitkan hilang.

²⁶Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah...*, 326-327.

²⁷ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 148-149.

2. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *ijārah* telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu adalah jasa seseorang, maka ia berhak menerima upahnya. Kedua hal ini disepakati oleh seluruh ulama fiqih.
3. Menurut ulama hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad, karena akad *ijārah* , menurut mereka tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad *ijārah* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad, karena manfaat menurut mereka boleh diwariskan dan *ijārah* sama dengan jual beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.
4. Menurut ulama hanafiyah, apabila ada udzur dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkait utang yang banyak, maka akad *ijārah* batal. Udzur-udzur yang dapat membatalkan akad *ijārah* itu menurut ualama hanafiyah adalah salah satu pihak jatuh muflis, dan berpindah tempatnya penyewa misalnya, seseorang digaji untuk menggali sumur di suatu desa, sebelum sumur itu selesai, penduduk desa itu pindah ke desa lain. Akan tetapi, menurut jumhur ulama, udzur yang boleh membatalkan akad *ijārah* itu hanyalah apabila obyeknya mengandung cacat²⁸ atau manfaat yang dituju dalam akad itu hilang. Seperti kebakaran dan dilanda banjir.²⁹

²⁸ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam...*, 149.

²⁹Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam ...*, 238.

Jadi sebelum melakukan akad *ijārah* sudah seharusnya memenuhi syarat dan rukun *ijārah* dan keterbukaan antara kedua belah pihak yaitu petani tambak dan pemilik *pirik'an* secara langsung. Untuk kesepakatan mengenai upah juga demikian. Sehingga jelas manfaatnya dan diperbolehkan upahnya tidak harus menggunakan mata uang. Sehingga tidak ada pihak yang akan merasa dirugikan.

Dengan demikian praktek Sewa-menyewa di desa Tanjung Widoro kecamatan Bungah kabupaten Gresik akan tidak sah apabila pihak ketiga tidak mendapat kepercayaan dari pemilik *pirik'an* untuk menyewakan maupun memberikan tarif sewa *pirik'an* tersebut. Perkara mengenai kerugian terhadap *pirik'an* yang rusak dikarenakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab akan lebih berkurang. Dan juga lebih jelas akadnya terhadap dua belah pihak. Oleh karena itu, transaksi dianggap sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau merasa tertipu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abū Dāwud sulaiman ibn al-‘As’ab, *Sunan Abū Dāwud*, Beirut: (al-Maktabah al-ushriyah, Vol. IV, tt.
- Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Agus, *Wawancara*, Gresik, 4 Oktober 2018.
- Ali Muhammad Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (Fikih Muamalat)*, Jakarta: PT Raja Gravindo Persada, 2003.
- Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* , Jakarta : Sinar Grafika, 2006.
- Ali Muhammad Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (Fikih Muamalat)*, Jakarta: PT Raja Gravindo Persada, 2003.
- Asikin, *Wawancara*, Gresik, 4 Oktober 2018.
- Az-Zuhaili, wahbah, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* , Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Arikunto, Suharsimi *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* , Bandung: PT Rineka Cipta, 2006.
- Al-Fauzan Shaleh, *Fiqh Sehari-Hari* terjemah Abdul Hayyie Al-Kattani, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Tangerang: PT Panca Cemerlang, 2010.
- Dwi Dian Kurniasih, *Tinjauan hukum Islam terhadap akad sewa mesin prontok padi yang menjelaskan tentang sewa-menyewa mesin prontok padi*. Skripsi—Fakultas Syariah, SIAIN Purwokerto, Purwokerto, 2017.
- Djuwaini Dimyauddin, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Elmiyatin Atik, *Tinjauan Hukum Islam terhadap sistem penyewaan kolam pancing harian dan kiloan di pemancingan lestari desa Cerme lor kec. Cerme kab. Gresik*. skripsi—Uin Sunan Ampel Surabaya, 2009.

- Faiz, *Wawancara*, Gresik, 3 Oktober 2018.
- Herdiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta Selatan : Salemba Humanika, 2010.
- Idrus Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Yogyakarta: Erlangga, 2009.
- Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta Gaya Media Pratama, 2007.
- Jazuri Adurrahman, *al- Ala Madzahib al Arba'ah*, Jakarta: Darul Ulum Press, 2002.
- Kartikasari Ratna, *Tinjauan hukum Islam terhadap praktek jasa penggilingan padi keliling didesa purworejo kecamatan geger kabupaten madiun*, Skripsi—STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2016.
- Karim, Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Khafid, Shaikhul , *Wawancara*, Gresik, 1 Oktober 2018.
- Mashuda Abdurrahman,,*Pengantar dan Asas -Asas Hukum Perdata Islam*, Surabaya: Central Media, 1995.
- Masrukhan, *Metodologi Penelitian (hukum)*, Surabaya: Uinsa Press, 2014.
- Mustofa, Imam , *Fikih Muamalah Kontemporer*, Jakarta : PT Raja Gravindo Persada, 2016.
- Mujip, Suhel, *Wawancara*, Gresik, 4 Oktober 2018
- Mz Labib, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2006.
- Nasir, Moch, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Nisaullatifah, Malia *Analisis hukum Islam terhadap sistem sewa menyewa rental mobil tom's garage kecamatan kadipiro Surakarta*, Skripsi—UMS Surakarta, Surakarta, 2016.
- Paimin, *Wawancara*, Gresik, 3 Oktober 2018
- Prastowo, Andi *Menguasai Teknik-teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Diva Press, 2000.
- Rahman Abdul Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Cet. Ke 8*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Suhel, *Wawancara*, Gresik, 2 Oktober 2018.
- Selamet, *Wawancara*, Gresik, 5 Oktober 2018.
- Sunhaji, *Wawancara*, Gresik, 2 Oktober 2018.
- Syafe'i, Rahmat , *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Pustaka Setia, 2012.
- Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofian, *Metode Penelitian Suvai*, Jakarta: LP3ES, 1989.
- Yasin, *Wawancara*, Gresik, 3 Oktober 2018.
- Yusuf Muri, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: kencana, 2017.
- Wardi Muslich, Ahmad, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2013.